

PERKEMBANGAN MORFOLOGI KOTA GORONTALO DARI MASA TRADISIONAL HINGGA KOLONIAL

MORPHOLOGICAL DEVELOPMENT OF GORONTALO CITY FROM TRADITIONAL ERA UNTIL COLONIAL ERA

Irfanuddin Wahid Marzuki

Program Doktor Ilmu-Ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya UGM

irfanudin.wahid@kemdikbud.go.id

ABSTRACT

Gorontalo is the biggest city and the forerunner of the present Gorontalo Province. Gorontalo has been existing since traditional era, Islamic kingdoms, colonial, and up to the present. During the traditional and kingdom era, Gorontalo was the small kingdom included in Ternate area. In fact, it witnessed the changes of power during colonial era when it was excluded from Manado regency. It remained the same even until independence time, Gorontalo became the area of North Sulawesi Province until in the year 2000 became its own province. The purpose of this research is to reveal the morphological development of the city respectively from traditional to colonial era in addition to find out the background factor of the morphological development. This research used urban archaeology whose main studies are urban components, including urban planning as well as city life as the inseparable component. This research underwent the following steps, collecting data, analysis and interpreting data resulted in a conclusion. The data collections includes primary data and secondary one (archive, text, maps, and other literacy sources). The result suggested that during traditional era the morphological city of Gorontalo was simple, and the settlement was spreading in small groups and doesn't have a regular urban planning component. The starting point as a city with regular spatial components began during the reign of Sultan Botutihe. Subsequent developments in the colonial period of the city center moved to the south referring to the rule of law of indies.

Keyword: *morphology, city, Gorontalo, urban archaeology*

ABSTRAK

Kota Gorontalo merupakan kota terbesar dan menjadi cikal bakal Provinsi Gorontalo. Keberadaan Gorontalo dimulai semenjak masa tradisional, kerajaan, kerajaan Islam, kolonial, hingga saat ini. Pada masa tradisional dan kerajaan, Gorontalo merupakan (vasal) kerajaan kecil yang masuk wilayah kerajaan Ternate. Gorontalo mengalami perubahan kekuasaan pada masa kolonial, dengan dimasukkannya ke dalam wilayah Karesidenan Manado. Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan pada masa kemerdekaan, Gorontalo menjadi wilayah Provinsi Sulawesi Utara hingga tahun 2000 menjadi provinsi tersendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan morfologi kota Gorontalo dari masa tradisional hingga kolonial dan faktor yang melatarbelakangi perkembangan morfologinya. Penelitian menggunakan kajian arkeologi perkotaan, yang menitikberatkan kajian terhadap komponen-komponen perkotaan, meliputi tata kota dan konsep yang melatarbelakanginya, serta kehidupan masyarakat kota sebagai satu kesatuan. Tahap penelitian meliputi pengumpulan data, analisis dan interpretasi data yang menghasilkan suatu kesimpulan. Tahap pengumpulan meliputi data primer (artefaktual) dan data sekunder (arsip, naskah, peta, dan sumber tertulis lainnya). Hasil penelitian menunjukkan pada masa tradisional morfologi kota Gorontalo masih sederhana, permukiman menyebar dalam kelompok-kelompok kecil, dan tidak memiliki komponen tata kota yang teratur. Titik permulaan sebagai sebuah kota dengan komponen tata ruang yang teratur dimulai pada masa pemerintahan Sultan Botutihe. Perkembangan selanjutnya pada masa kolonial pusat kota dipindah ke selatan mengacu kepada aturan law of indies.

Kata Kunci: morfologi, kota, Gorontalo, arkeologi perkotaan.

Tanggal Masuk : 12 Januari 2018

Tanggal Diterima : 02 April 2018

PENDAHULUAN

Kota Gorontalo merupakan kota terbesar sekaligus ibukota Provinsi Gorontalo yang terletak di Teluk Tomini. Secara geografis kota Gorontalo terletak pada koordinat 120°59'44"-123°05'59"BT dan 00°28'17"-00°035'56"LU, dengan luas 64,79 km². Wilayah kota Gorontalo berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango di sebelah utara dan timur, Teluk Tomini di selatan, dan Kabupaten Gorontalo di sebelah barat (<http://gorontalokota.go.id>, diunduh tanggal 26 September 2017).

- Mengenai asal usul nama Gorontalo, ada beberapa pendapat, antara lain;
- Berasal dari kata *Hulontalangi*, nama salah satu kerajaan yang kemudian disingkat menjadi Hulontalo.
 - Hulontalangi*, berasal dari kata *Huo lolontalango* yang berarti orang Gowa yang berjalan kian kemari.
 - Hulutalangi* dan *Hulua lo tola* yang berarti lebih mulia.
 - Hulua lo tola*, yang berarti tempat pembiakan ikan *kabos* (gabus).
 - Pogolatalo* atau *pohulatalo*, yang berarti tempat menunggu.
 - Gorontalo*, nama salah satu kemenakan raja Tidore.
 - Gunung telu*, dari ucapan orang Gowa apabila hendak memasuki pelabuhan Gorontalo terlihat dari jauh adanya tiga buah gunung yang menonjol.
 - Mengingatnkan perpindahan penduduk dari tempat yang berbukit-bukit (*Hunto*) ke suatu tempat yang senantiasa digenangi air (*langi-langi*).

Kata *Hulontalo* sampai sekarang masih digunakan dalam percakapan sehari-hari masyarakat Gorontalo. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, orang Belanda kesulitan mengucapkan kata *Hulontalo*,

sehingga menjadi *Horontalo* yang apabila ditulis menjadi *Gorontalo* yang dipakai hingga sekarang (Yayasan 23 Januari, 1982:5). Topografi wilayah Gorontalo merupakan wilayah dataran rendah yang diapit tiga sungai (Sungai Bone, Bolango, dan Tamalate) yang bermuara di Teluk Tomini, serta dua perbukitan terjal di bagian selatan.

Wilayah kota Gorontalo sekarang merupakan perubahan dari wilayah *Pohala* (kerajaan) Gorontalo. Kerajaan Gorontalo merupakan persekutuan dari 17 *linula* (kelompok kecil) yang memiliki ikatan teritoris dan genealogis di wilayah Gorontalo (Hasanuddin dan Basri Amin, 2012:15; Hasanuddin, 2014:25). Kekuasaan lokal pribumi di Gorontalo berakhir dengan adanya perjanjian Sultan Amsterdam (Sultan Kerajaan Ternate) dan Robertus Padtbrugge (VOC) yang memuat pelepasan hak tuntutan Ternate atas wilayah Sulawesi Utara termasuk Gorontalo dan menyerahkannya pada VOC pada tanggal 11 Mei 1677 di *Fort Oranje*, Ternate (Rahim, 2009:101). Pada tahun 1705 VOC mendirikan kantor dagang pertama di Gorontalo untuk menguasai perdagangan dan mengatur kontrak dagang serta hubungan dengan raja-raja di Gorontalo yang menandai penguasaan VOC atas Gorontalo secara resmi (Yayasan 23 Januari, 1982:25). Selanjutnya pada tahun 1746 Gubernur Maluku Blokland, mengadakan kontak dengan raja Gorontalo untuk mendirikan rumah dinas Peter Kock (perwakilan VOC di Gorontalo) (Rahim, 2009:118). Kekuasaan Belanda di Gorontalo semakin kuat dengan dibangunnya perumahan dan Benteng Nassare di Tamuyo pada tahun 1770 (Yayasan 23 Januari, 1982:25). Setelah VOC dibubarkan tahun 1799, wilayah

Gorontalo menjadi wilayah jajahan Hindia Belanda (Ismail, 2009:78). Pemerintah Hindia Belanda mulai intervensi terhadap pemerintahan lokal Gorontalo. Salah satu tindakan pemerintah kolonial Belanda adalah mengangkat seorang Raja *Gouvernement* yang bertugas memelihara hubungan dengan *gubernemen* (Apriyanto,2001:46).

Pada tahun 1824, Gorontalo digabungkan dengan Minahasa, menjadi sebuah *afdeeling* yang diperintah seorang Asisten Residen (Rahim, 2009:116; Hasanuddin, 2014:63). Pada tahun 1889 terjadi perubahan sistem pemerintahan kolonial Belanda, wilayah kerajaan Gorontalo dialihkan ke pemerintahan langsung Batavia yang dikenal dengan istilah "*Rechtatreeks Bestur*". Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan Daerah Limo *pohalaa* dibagi atas tiga *onder afdeling* yaitu: Kwandang, Boalemo, dan Gorontalo. Pada tahun 1920 *onder afdeling* diubah menjadi *distrik*. Wilayah Gorontalo berubah menjadi lima distrik dengan dimasukkannya Limboto dan Bone dalam wilayah Gorontalo, namun tidak bertahan lama. Pada tahun 1922 Gorontalo ditetapkan menjadi tiga Afdeling yaitu : Gorontalo, Boalemo, dan Buol (<http://gorontalokota.go.id/index.php/sejarah-gorontalo/>, diunduh tanggal 26 September 2017).

Setelah kemerdekaan wilayah Gorontalo menjadi wilayah Provinsi Sulawesi Utara sampai tahun 2000. Provinsi Gorontalo secara resmi disahkan pemerintah pada tanggal 22 Desember tahun 2000 melalui penetapan sidang paripurna DPR RI pada tanggal 5 Desember 2000 (<https://www.gorontaloprov.go.id/profil/sejarah>, diunduh tanggal 26 September 2017). Pada awal

pembentukan provinsi Gorontalo, kantor gubernur menempati kawasan pusat kota, namun dipindah ke Puncak Botu pada masa pemerintahan Gubernur Fadhel Muhammad.

Tata ruang kota Gorontalo saat ini merupakan tata ruang kota peninggalan kolonial Belanda yang mengacu aturan *Law of Indies* dan dapat dikategorikan sebagai kota kolonial baru (*nieuw indisch stad*) (Marzuki, 2012:132). Prinsip perancangan kota kolonial mengacu kepada dokumen *Law of Indies tahun 1573*, yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan pola *grid* dan pembagian blok-blok kapling dalam ukuran yang setara (Sunaryo, 2015:50-51). Prinsip *Law of Indies* diuraikan lebih lanjut sebagai berikut (Sunaryo, 2015:50).

1. Penempatan *plaza* (lapangan atau *alun-alun*) utama sebagai titik awal kota,
2. Gereja utama sebagai bangunan sentral penyebaran agama ditempatkan di *plaza* utama,
3. Penempatan bangunan-bangunan publik (balai kota, perkantoran, rumah sakit, perumahan) di sekitar *plaza* utama tanpa mengurangi keutamaan gereja.

Berangkat dari kondisi tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana perkembangan morfologi (bentuk dan struktur tata ruang) kota Gorontalo dari kota tradisional hingga kota kolonial? Penelitian mengenai morfologi kota dan perkembangannya secara khusus di Gorontalo belum pernah dilakukan, baik oleh kalangan arsitek, planologi maupun arkeologi. Penelitian yang pernah dilakukan selama ini baru sebatas sejarah asal-usul kota, namun belum mengarah kepada pembuktian secara fisik asal-usul dan perkembangan kota Gorontalo.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan membuktikan asal-usul dan perkembangan morfologi kota Gorontalo mulai dari kota tradisional, kerajaan, hingga masa kolonial serta faktor yang mempengaruhi perkembangan morfologi kota tersebut. Hasil penelitian nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan kota Gorontalo kedepannya, mengingat kota Gorontalo merupakan salah satu kota yang memiliki kawasan kota lama di Sulawesi dengan tinggalan-tinggalan arkeologi yang sangat potensial. Selain itu juga dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk penetapan kawasan zonasi kota pusaka yang sedang direncanakan pemerintah kota Gorontalo.

METODE

Penelitian ini menggunakan penalaran induktif, yang dimulai dari fakta-fakta atau gejala-gejala khusus hasil pengamatan, kemudian disimpulkan sebagai gejala yang bersifat umum (Tanudirdjo, 1989:34). Penelitian ini menggunakan kajian arkeologi perkotaan, yaitu studi arkeologi yang mempelajari hubungan antara budaya material, tingkah laku, dan kegiatan manusia masa lalu dalam suatu kota (Staski, 1982:97; 2008:5). Kajian arkeologi perkotaan bertujuan menggambarkan pola persebaran data arkeologi untuk mengungkap pola pikir dan pola tingkah laku masyarakat masa lampau (Kurniawan, 2011:536). Landasan ontologis arkeologi perkotaan adalah tinggalan-tinggalan arkeologi yang berupa himpunan sarana fisik terutama bangunan, jaringan jalan, sisa kegiatan penghunian, dan sarana produksi (Nurhadi, 1995:5).

Unit pengamatan dalam studi perkotaan meliputi lingkungan fisik, artefak, fitur, dan etno sejarah. Lingkungan fisik sebagai unit pengamatan meliputi topografi yang mempengaruhi pemilihan lokasi kota dan permukiman, serta akses dengan wilayah penyangga. Pengamatan artefak berupa pengamatan terhadap bangunan dan sebaran komponen tata ruang kota, kawasan perkotaan, hubungan antar komponen struktur tata ruang serta sarana transportasi kota Gorontalo. Pengamatan fitur berupa pengamatan terhadap sisa-sisa bangunan masa kolonial yang masih tersisa, seperti bekas dinding bangunan, bekas penjara, dan bekas dermaga, dan bekas benteng. Pengamatan etno sejarah meliputi toponim dan sumber-sumber sejarah yang berupa arsip, peta, dan foto yang berasal dari masa lalu. Pengamatan toponim dapat menunjukkan hubungan fungsional antara kegiatan hunian satu dengan yang lainnya. Sumber sejarah dapat digunakan sebagai dasar pengkerangkaan dalam studi perkotaan (Tim Penyusun, 2008:185-186).

Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, analisis dan interpretasi data yang menghasilkan suatu kesimpulan. Tahap pengumpulan meliputi data primer (data artefaktual yang masih ada) dan data sekunder (arsip, naskah, peta, dan sumber tertulis lainnya).

HASIL PENELITIAN

Kota pada dasarnya merupakan hasil adaptasi sekelompok manusia dalam jumlah yang besar terhadap lingkungan budaya dan alamnya. Kata kota berasal dari kata “*kuta*” yang secara harfiah berarti daerah permukiman

yang dikelilingi tembok berbentuk persegi (Nas, 1989:23; Wiryomartono, 1995:22). Perkembanganselanjutnya kota tidak hanya terbatas pada struktur fisik saja, namun meluas sesuai dengan pengaruh kekuasaan sang pemimpin (Pratomo, 2001:44).

Kota Indonesia awal merupakan kota-kota kerajaan yang terdapat di pedalaman, dan merupakan pusat kerajaan-kerajaan sebelum bangsa Eropa menguasai Indonesia. Kota *indis* merupakan kota periode awal bangsa Belanda berkuasa di Indonesia. Pola dan struktur kota mengikuti pola-pola kota yang ada di Belanda dikombinasikan dengan kebudayaan lokal Indonesia. Kota kolonial merupakan kota yang bercirikan Eropa, berkembang mulai tahun 1870an dan terdapat pemisahan lokasi hunian yang jelas berdasarkan struktur sosial masyarakatnya. Kota modern merupakan kota yang lahir setelah masa kemerdekaan Indonesia (Nas, 1986:5-9; Gill, 1997:60).

Dalam penelitian perkembangan morfologi kota Gorontalo ini dapat dikategorikan dalam tiga tahap, yaitu masa kota tradisional-awal kerajaan Islam, masa kerajaan Islam, dan masa kolonial. Masa kota tradisional sampai awal masa kerajaan Islam merupakan masa dimana permukiman Gorontalo belum terkena pengaruh Islam dan masih bersifat tradisional, dan tinggal dalam kelompok-kelompok permukiman yang belum tertata hingga awal pengaruh Islam di Gorontalo. Masa kerajaan Islam dimulai pada masa pemerintahan Sultan Botutihe yang merancang kota Gorontalo mengikuti konsep kota Islam dengan istana dan masjid sebagai pusat yang dianggap

orientasi. Pusat kota Gorontalo kemudian dipindahkan ke arah selatan mendekati muara sungai pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pusat kota baru yang dibuat mengikuti pola kota kolonial baru (*nieuw colonial stad*).

Kota Tradisional dan Awal Kerajaan Islam (-1736)

Kota tradisional berbeda dengan kota modern yang teratur dan direncanakan pembangunannya. Kota tradisional merupakan pusat peradaban yang masih terikat dengan tradisi pedesaan, namun sudah terdapat perbedaan kelas sosial dan pembagian kerja yang jelas. Masyarakat kelas atas menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan dan tinggal di pusat permukiman, sedangkan masyarakat kelas bawah menduduki jabatan rendah, prajurit, pedagang, dan tukang serta tinggal di wilayah pinggiran (Menno dan Alwi, 1994:29). Kota tradisional umumnya masih didominasi kekuasaan tradisional, berakar pada peradaban agraris, dan tidak memiliki ruang publik (Santoso, 2006:82).

Pada periode kota tradisional, morfologi kota Gorontalo dipengaruhi sistem pemerintahan tradisional yang berdasarkan demokrasi. Penentuan jabatan *olongia* (penghulu atau raja) bukan berdasarkan keturunan, namun hasil pemilihan yang dilakukan oleh pemangku adat (*baate* atau *bantayo poboide*). *Olongia* (penghulu atau raja) dibedakan menjadi dua, yaitu *olongia to tilayo* (raja atas atau hulu) menguasai wilayah bagian utara Gorontalo, dan *olongia to huliyaliya* (raja bawah atau hilir) yang menguasai wilayah selatan Gorontalo (Hasanudin dan Basri Amin, 2012:2). Dalam menjalankan pemerintahan, *olongia* dibantu oleh

aparatus *linula* yang disebut *buatula totolu* yang terdiri dari;

- a. *Bubato* yang menjalankan pemerintahan sehari-hari dikepalai langsung oleh *olongia*.
- b. *Saraa* (setelah pengaruh Islam) yang bertugas melakukan upacara keagamaan dan dikepalai oleh *hatibidaa* atau *saladaa*.
- c. *Bala* yang bertugas dalam bidang keamanan dan pertahanan dan dikepalai oleh *taulio*.

Selain itu, dalam menjalankan pemerintahan seorang *linula* didampingi oleh satu Dewan Musyawarah Rakyat disebut dengan *bantayo paboide* yang bertugas antara lain:

- a. Membicarakan masalah kesejahteraan rakyat.
- b. Menetapkan apakah ketentuan-ketentuan yang telah dimusyawarahkan telah dijalankan *olongia* dengan baik atau tidak.
- c. Mengesahkan pengangkatan atau pemberhentian *olongia* atau pembantu-pembantunya.

Anggota *bantayo paboide* terdiri dari orang-orang tua (*mongopanggola*), tokoh masyarakat (*tulaibala*) dan para wakil rakyat (*utolia*) (Hasanuddin, 2014:16).

Pengaruh kerajaan Islam di Gorontalo dimulai pada masa pemerintahan Raja (*Olongia to Tilayo*) Amai (1472-1550) yang memperistri Owutango (puteri Raja Palasa di Tomini yang beragama Islam). Syarat pinangan yang diajukan oleh Raja Palasa adalah Raja Amai harus memeluk agama Islam, dan adat istiadat Gorontalo harus bersumber kepada Al Qur'an. Raja Amai yang menyetujui syarat tersebut kemudian melakukan beberapa perubahan antara lain.

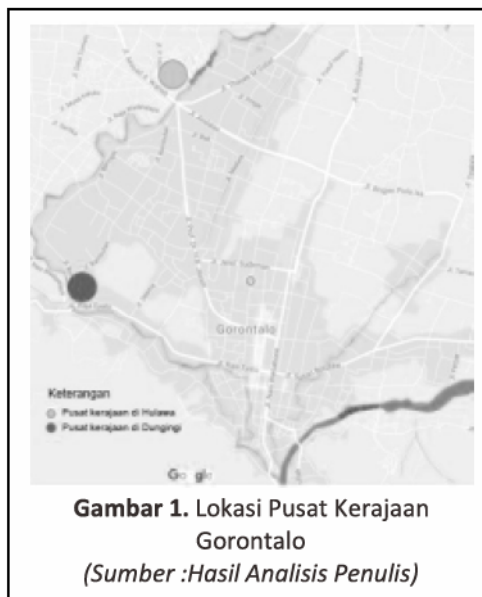
- a. Merubah gelarnya menjadi Sultan
- b. Menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan

mengatur adat istiadat yang bersumber kepada Kitabullah (Al Qur'an) dan

- c. Membangun masjid di daerah Hunto (Masjid Hunto Sultan Amai) (Hasanudin dan Basri Amin, 2012:23).

Untuk membantu menyusun peraturan adat berdasar Kitabullah (Al Qur'an), maka Sultan Amai mendatangkan tokoh-tokoh agama dari Kerajaan Palasa (Tomini) yang ditempatkan di wilayah seberang Sungai Bolango. Tokoh-tokoh agama tersebut kemudian menetap dan membentuk permukiman yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Siendeng (Hasanudin dan Basri Amin, 2012:25).

Lokasi Kerajaan *Hulondalo* dimulai dari Kelurahan Hulawa di pinggir Sungai Bolango, kemudian dipindahkan ke Duingingi, Kelurahan Tuladenggi (pertemuan Sungai Bolango dengan saluran air dari Danau Limboto), sekitar tahun 1600an. Pemindahan lokasi pusat kerajaan dilakukan oleh Raja Eyato dengan alasan mendekati wilayah pantai untuk memudahkan hubungan dengan kerajaan lain (Hasanuddin dan Basri Amin, 2012:60) (Lihat gambar 1).



Gambar 1. Lokasi Pusat Kerajaan Gorontalo
(Sumber :Hasil Analisis Penulis)

Perkembangan Gorontalo telah menarik minat VOC untuk menguasai wilayah Gorontalo. Tonggak kekuasaan VOC di Gorontalo diawali adanya perjanjian antara Sultan Amsterdam (Sultan Kerajaan Ternate) dan Robertus Padtbrugge (VOC) yang memuat pelepasan hak tuntutan Ternate atas wilayah Sulawesi Utara termasuk Gorontalo pada tanggal 11 Mei 1677 di *Fort Oranje*, Ternate (Rahim, 2009:101) dan dilanjutkan dengan kedatangan Robertus Padtbrugge pada tanggal 27 September 1677 di Gorontalo (Hasanuddin dan Basri Amin, 2012:59; Hasanuddin, 2014:33). Rakyat Gorontalo melawan masuknya VOC dibawah kepemimpinan Raja Eyato dan Raja Bia, namun dapat dikalahkan oleh VOC. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani tahun 1681, Kerajaan Gorontalo harus tunduk kepada peraturan VOC. Selanjutnya, VOC mengajukan tuntutan untuk menyediakan lahan untuk kepentingan VOC yang kemudian berkembang menjadi permukiman di sebelah selatan kota Gorontalo (Hasanuddin, 2014:63).

Morfologi kota Gorontalo pada masa kota tradisional dan awal kerajaan Islam masih sangat sederhana. Komponen tata ruang kota meliputi permukiman, jaringan jalan, dan rumah ibadah. Masyarakat tinggal dalam permukiman sederhana, dengan rumah panggung terbuat dari kayu, bambu, dan atap daun rumbia, alang-alang, atau daun enau (Tim Penyusun, 1977/1978:32).

Permukiman kota tradisional Gorontalo masih sangat sederhana dan tinggal mengelompok. Faktor yang melatarbelakangi pola permukiman mengelompok masyarakat tradisional Gorontalo yaitu: pertahanan menghadapi

ancaman serangan musuh dari luar (bajak laut Mangindano, dan kerajaan-kerajaan lain di sekitar Gorontalo), adanya ikatan keluarga atau keturunan, dan kegiatan ekonomi yang berbasis pertanian (Marzuki, 2012:178). Usaha mengumpulkan dan menyatukan permukiman tradisional Gorontalo di satu lokasi pernah dilakukan oleh Raja (*Olongia*) llahudu tahun 1385 (Hasanudin dan Basri Amin, 2012:15) dan *Bui Bongale*, namun tidak berhasil karena tantangan alam. Hanya sedikit penduduk yang mau menetap bersama pemimpinnya dalam satu lokasi (Juwono dan Hutagalung, 2005:31). Permukiman kota Gorontalo berkembang dengan adanya pendatang-pendatang dari wilayah lain (Bugis, Makassar, Ternate, dan Cina). Mereka membentuk permukiman di sekitar kota Gorontalo.

Penggunaan lahan sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Pertanian sawah terdapat pada wilayah dataran rendah sekitar aliran Sungai Bone dan Bolango, sedangkan lahan di perbukitan sekitar Danau Limboto digunakan untuk lahan sawah kering dan perkebunan (Henley, 2005:489). Jaringan jalan pada periode tradisional dapat dikategorikan sebagai jalan informal, Jalan informal merupakan jalur tidak resmi, biasanya berupa jalan setapak atau jalur perdagangan dengan konstruksi yang tidak bagus (Earle, 1991:10; Trombold, 1991:3). Pola jalan tidak teratur dilihat dari bentuknya yang melingkar-lingkar, dan lebarnya bervariasi dalam satu ruas jalan.

Walaupun bentuk pemerintahan sudah berubah menjadi sebuah kerajaan Islam, namun pola tata ruang kota masih

bersifat tradisional. Pola tata ruang kota kerajaan Islam dengan bangunan penguasa (istana) sebagai pusat orientasi yang dikelilingi oleh masjid, makam, pasar dan alun-alun (Adrisijanti, 2000:248; Tjandrasasmita, 2008:259) tidak terlihat. Faktor yang menyebabkan pola tata ruang kota Islam belum diterapkan di Gorontalo karena struktur kekuasaan Kerajaan Gorontalo yang berbeda dengan kerajaan di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Jabatan raja tidak berdasar keturunan, melainkan dipilih berdasarkan musyawarah para penguasa (*olongia*) dari beberapa kerajaan kecil (*linula*), sehingga pusat pemerintahan berpindah-pindah sesuai tempat tinggal raja yang ditunjuk saat itu (Saptaningrum, 2008:32).

Dalam tata ruang kota Islam, masih dipengaruhi unsur kosmologis dan magis-religius. Raja atau sultan dengan istananya merupakan pusat orientasi (Tjandrasasmita, 2008:258). Pusat kekuasaan identik dengan pusat kota, sehingga apabila lokasi kekuasaan berpindah, maka pusat kota akan berpindah ke pusat kekuasaan yang baru. Pusat kekuasaan yang biasanya akan mati dengan sendirinya. Demikian pula yang terjadi di Gorontalo, perpindahan pusat kekuasaan dari Hulawa ke Duingingi mempengaruhi perkembangan kota tradisional di Gorontalo.

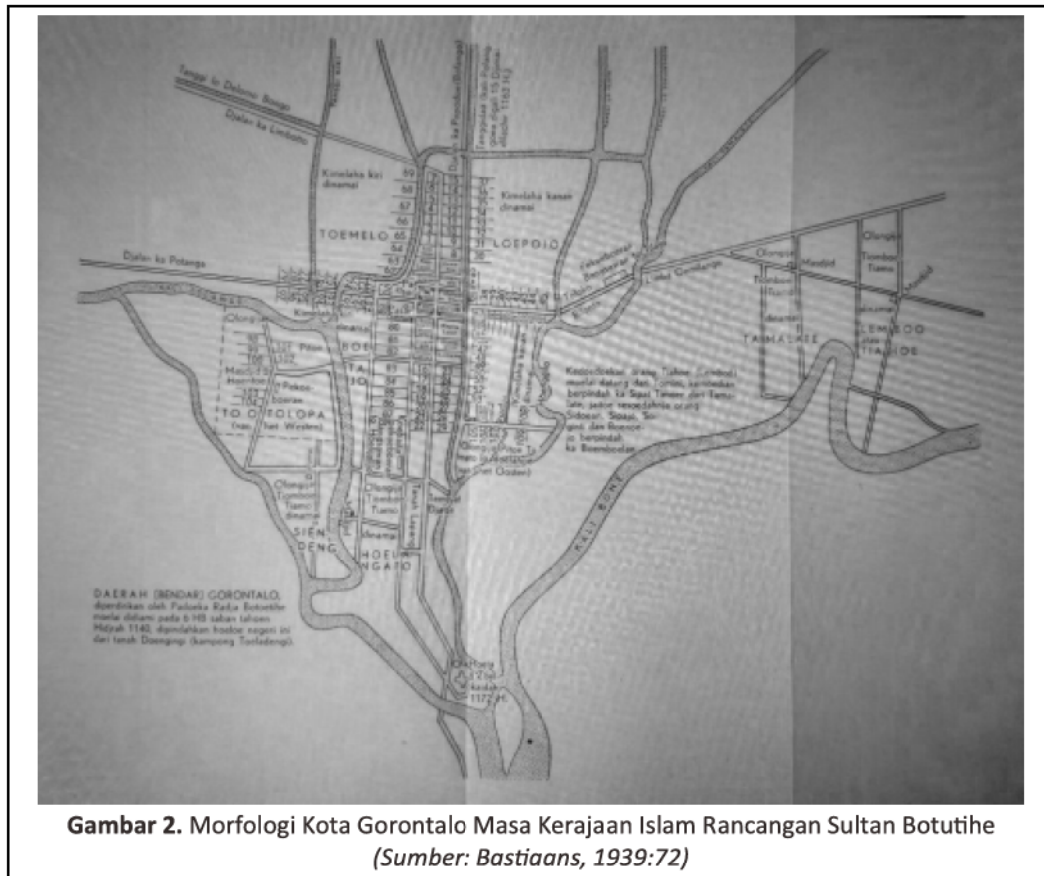
Kota Kerajaan Islam (1728-1894)

Sejarah awal mula Gorontalo sebuah kota yang direncanakan dibangun pada masa Sultan Botutihe. Lokasi ibukota dipindahkan dari Duingingi ke suatu wilayah dekat Sungai Bolango (sekarang masuk dalam wilayah kelurahan Biawao dan Limba B) pada 6 Sya'ban 1140 H atau 18 Maret 1728 M (Bastiaans,

1939:73). Tujuan pemindahan lokasi ibukota kerajaan untuk mendekati muara Sungai Bone sebagai pintu gerbang masuk ke Gorontalo dan menghalangi penempatan permukiman Belanda (VOC) (Marzuki, 2012:6).

Pola kota yang dibangun mengacu kepada pola kota kerajaan Islam, yang terdiri dari masjid dan kediaman penguasa, pasar dan hunian penduduk sebagai suatu sistem. Untuk membangun kota kerajaan Islam, langkah yang dilakukan Sultan Botutihe antara lain; mendirikan pusat pemerintahan, membangun pasar, pembuatan jalan dan jembatan, pelabuhan, penataan permukiman dengan menempatkan perumahan pejabat di pusat kota, pembuatan saluran air untuk pengairan sawah di Tanggiki serta Tanggidaa (Hasanudin dan Basri Amin, 2012:65), dan menentukan lokasi pekuburan umum (Yayasan 23 Januari, 1982:29) (Lihat gambar 2).

Komponen tata ruang kota yang dibangun di lokasi ibukota yang baru meliputi: kediaman raja (*mahligai to tilayo* dan *mahligai to huliya*), *bantayo poboide* (balai permusyawaratan), masjid kerajaan, dan perumahan pembesar kerajaan (Yayasan 23 Januari, 1982:29). Lokasi keraton atau *mahligai to tilayo (udik)* berada di depan masjid, sedangkan lokasi *mahligai to huliya liyo (hilir)* berada di jalan Ahmad Yani (sebelah selatan *Mahligai To Tilayo*). Masjid kerajaan sekarang masih berdiri di pusat kota dan dikenal dengan nama Masjid Baiturrahim Rumah pembesar kerajaan berada di antara *mahligai to tilayo* dan *mahligai to huliya liyo*. gedung *bantayo poboide* (dewan adat) berada di lokasi Markas Kodim 1304 Gorontalo sekarang ini (sebelah barat *mahligai to huliya liyo*). Lokasi perumahan komandan



Gambar 2. Morfologi Kota Gorontalo Masa Kerajaan Islam Rancangan Sultan Botutihe
(Sumber: Bastiaans, 1939:72)

tidak mampu mengerjakan ladangnya. Selain itu juga terjadinya kekeringan berkepanjangan akibat pengaruh iklim dari Teluk Tomini (Henley, 2005:205-206).

Selain penduduk asli Gorontalo, terdapat permukiman-permukiman pendatang baru berdasarkan etnis. Pendatang-pendatang dari Bugis, Luwu, Mandar, Donggala, dan Makasar membentuk permukiman pada daerah-daerah yang datar di dekat pantai dan pertemuan Sungai Bone dan Bolango. Permukiman Belanda berada di Benteng Nassau dan sekitarnya yang terletak dekat muara Sungai Bone Bolango dan menghadap Teluk Tomini. Berdasarkan data gambar koleksi Atlas Mutual Heritage, Benteng Nassau berbentuk segi empat dan memiliki dua bastion (satu menghadap Teluk Tomini dan

pasukan atau *kimalaha* dan benteng pertahanan terletak di sekelilingnya (Jusuf, 2000:69). Dari kesemua komponen tata ruang kota tersebut, hanya Masjid Baiturrahim yang tersisa saat ini, sedangkan bangunan yang lain sudah tidak tersisa. Morfologi kota Gorontalo pada masa pemerintahan Sultan Botutihe (masa kota kerajaan) berbentuk persegi.

Pola permukiman masih mengelompok, namun dalam ukuran yang lebih luas khususnya di wilayah pusat kota. Penduduk Gorontalo pada pertengahan abad ke-19 termasuk daerah yang jarang penduduknya, luas wilayah Gorontalo 12.000km² dengan tingkat kepadatan penduduk tidak lebih dari 10 jiwa/km². Faktor yang menyebabkan karena seringnya terjadi kekurangan pangan dan wabah penyakit, sehingga orang

satunya menghadap ke darat). Terdapat bangunan residen, gudang dan asrama militer di dalam benteng yang memiliki dua pintu (Lihat gambar 3). Lokasi Benteng Nassau sampai saat ini belum diketahui dengan pasti dan masih memerlukan penelitian yang mendalam.



Pada masa penjajahan Belanda, terjadi perubahan struktur pemerintahan Gorontalo terdiri atas.

- a. Dua orang raja (raja *gouvernement* dan raja *negorij*).
- b. Dua orang *jogugu*, sebagai patih pembantu raja.
- c. Dua orang *kapiten* (panglima perang, satu di darat dan satu di laut).
- d. Empat orang *marsaoleh*, yang berwenang sebagai dewan perwakilan rakyat yang memilih raja dan kepala kampung.
- e. Tiga puluh orang *walupu* atau kepala kampung, dan
- f. Empat puluh orang pembesar kerajaan (ANRI, 1973:373-374).

Selain itu jabatan-jabatan dalam struktur pemerintahan tradisional *lipu*, seperti *bubato*, *olongia*, dan *bantayo poboide* diganti dengan sebutan distrik, *onderdistrik*, dan kampung. Pemecahan *linula* menjadi beberapa kampung dilakukan untuk

memudahkan pengawasan (Apriyanto, 2001:57-58).

Bentuk intervensi lain adalah masyarakat dipaksa untuk menyerahkan emas kepada pemerintah Belanda. Untuk memenuhi kebutuhan emas tersebut, rakyat banyak yang lari ke hutan dan melakukan transaksi perbudakan dengan harapan dapat memenuhi penyerahan emas yang diwajibkan (Apriyanto, 2001:46). Pemerintah Belanda mengantisipasi hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan, yang dikenal dengan *peraturan Scherer* karena dikeluarkan pada masa pemerintahan Asisten Residen Scherer. Pasal ini dibuat untuk memudahkan pelaksanaan perintah-perintah pemerintah Belanda dan Raja *Gouvernement* kepada raja negeri dan rakyatnya. Dalam *peraturan Scherer* disebutkan bahwa penduduk harus sedapat mungkin bertempat tinggal bersama dalam dusun-dusun yang teratur, yang terletak di pinggir jalan besar dan tidak seorang pun diperkenankan bertempat tinggal di hutan atau di pegunungan (Haga, 1981:81, Apriyanto, 2001:47).

Jaringan jalan dibangun di pusat kota dengan pola *grid* (persegi) yang membatasi wilayah permukiman satu dengan yang lain. Sistem jalan *grid* dilakukan dengan cara membagi kota menjadi bentuk-bentuk persegi dengan jalan-jalan paralel. Kelebihan sistem jalan ini adalah memiliki dimensi yang lebih pendek, lebih banyak ruang tersisa, dan lebih mudah menjangkau satu daerah dengan daerah lain.

Kota Kolonial (1894-1945)

Kota kolonial merupakan kota yang dikembangkan oleh bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Perancis, Belanda dan Inggris) di tempat-tempat baru yang mereka

datangi, khususnya di Asia dan Afrika. Kota-kota tersebut dibangun dengan konsep dan pola yang mendekati kota asal mereka (Basundoro, 2012:84). Cikal bakal kota kolonial awalnya berupa koloni-koloni yang dikembangkan oleh pendatang Eropa di daerah pantai (Taylor, 2003:59), dan mencari perlindungan kepada penguasa lokal (Wertheim, 1999:135). Kota kolonial merupakan kota yang terdapat dalam sebuah koloni penjajahan, jauh dari negara induknya, memiliki pemisahan hunian berdasar golongan etnis, sosial dan budaya sebagai hasil proses penjajahan (King, 1991:7).

Pola kota kolonial berdasarkan pada rasionalitas dengan bertumpu pada aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya Eropa (Heryanto, 2011:177). Pola kota kolonial dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: kota lama (*oud indisch stad*) dan kota baru (*nieuw indisch stad*) (Handinoto, 2010a:226-230; 430-431). Pola kota Belanda lama (*oud indisch*) memiliki dua pusat, yaitu pusat kota pribumi dengan komponen *alun-alun* dan kabupaten, serta pusat kota kolonial dengan komponen utama gedung residen. Morfologi kota lama (*oud indische*) masih menempatkan pusat kota tradisional (khususnya Jawa) dengan menambah penjara, lokasi kantor penguasa Kolonial ditempatkan pada permukiman Eropa. Pola kota baru (*nieuw indisch*) hanya terdapat satu pusat kota, pusat kota pribumi dan kolonial digabung menjadi satu dalam satu lokasi, yaitu *alun-alun* (Gill, 1995; Handinoto, 2015:109). Model *alun-alun* kemudian berkembang sebagai prototipe identitas kota jaman kolonial yang terdapat pasar dan daerah pertokoan tidak jauh dari pusat pemerintahan (Handinoto,

2010b:229). Latar belakang pembangunan kota baru adalah untuk memperlihatkan eksistensi kekuasaan pemerintah kolonial di tanah jajahan. Kota Gorontalo dapat dikategorikan sebagai kota kolonial baru (*nieuw indisch stad*).

Pola permukiman kota kolonial umumnya terbagi menjadi dalam tiga kelompok etnis yang berorientasi pada pusat kota, yaitu: a) daerah orang Eropa yang terletak di pusat kota yang nyaman dan strategis, b) daerah orang Cina (pecinan) dan Timur Asing, biasanya terletak dekat daerah perdagangan lokal atau pasar, c) daerah pribumi yang terletak agak jauh dari pusat kota, biasanya terdiri dari kampung-kampung yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kolonial (Handinoto, 2010a:297-298).

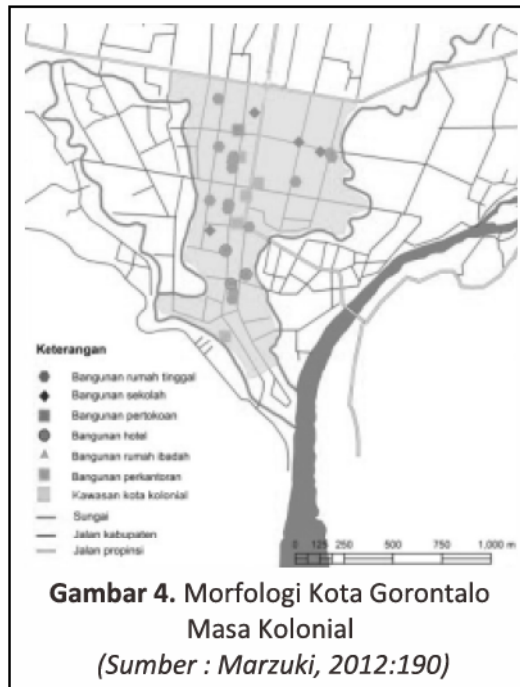
Pada tahun 1894, Gorontalo secara resmi dijadikan ibukota *afdeeling* Gorontalo oleh Belanda (Hasanuddin, 2014:81). Lokasi pusat Kota Gorontalo dipindah ke arah selatan lebih dekat dengan pelabuhan laut dengan struktur tata ruang kota mengikuti aturan *Law of indies*, yang menandai awal terbentuknya Kota Gorontalo sebagai kota kolonial (Marzuki, 2012:34). Pusat kota berupa lapangan (lapangan Taruna saat ini), dengan rumah asisten residen, hotel, penjara, perkantoran, dan permukiman Belanda di sekelilingnya. Morfologi kota Gorontalo pada masa kolonial mengalami perubahan dari berbentuk memanjang menjadi berbentuk kipas (*the fan city shape*), karena faktor geografis kota Gorontalo yang berada pada sebuah teluk, diapit dua sungai (Bone dan Bolango), serta perbukitan terjal di sisi kiri dan kanannya.

Pola permukiman kota Gorontalo pada masa kolonial,

seperti kota-kota kolonial lainnya dipisahkan berdasarkan etnis, yaitu: Eropa, Timur Asing (Cina, Arab, dan India), serta pribumi. Pemukiman Eropa menempati kawasan strategis di pusat kota, permukiman Timur Asing (Cina dan Arab) berada di sekitar pasar, dan penduduk pribumi berada di tempat agak jauh dari pusat kota. Kawasan pemukiman yang awalnya berada di sekitar lapangan (alun-alun), berkembang ke arah utara (kelurahan Biawao dan Biawau sekarang ini) dan ke arah timur (kelurahan Ipilo sekarang ini). Pada masa ini, jumlah penduduk meningkat menjadi 565.848 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 47,154 jiwa/km² (Yayasan 23 Januari, 1982:8). Faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk yaitu adanya perluasan wilayah administrasi, adanya sejumlah tenaga yang didatangkan dari wilayah lain ke Gorontalo dan perpindahan penduduk dari suku-suku tertentu ke Gorontalo. Berdasarkan data dari *Encyclopaedie Van het Nederlanch Indie*, pada tahun 1915 jumlah penduduk asing yang tinggal di Gorontalo berjumlah 1451 jiwa yang terdiri dari: 178 orang Belanda, 949 orang Cina, dan 324 orang Arab (Paulus, 1917:806). Sedangkan pada tahun 1940, orang asing di Gorontalo berjumlah 3.720 orang dengan rincian, orang Eropa: 220 orang, Cina: 2.400 orang dan golongan Timur Asing: 1.100 orang (Tim Penyusun, 1979:136). Selain pendatang Eropa dan Timur Asing, terdapat pendatang dari wilayah lain di Indonesia yang tinggal mengelompok antara lain: Kampung Bugis, Kampung Bajo, Kampung Jawa, Kampung Makasar, Kampung Minahasa, Kampung Bali, dan Kampung Sangir.

Jaringan jalan pada periode ini berbentuk *grid* (kotak) dengan lapangan sebagai pusatnya. Pada kota-kota kolonial dibangun sebuah jalan utama dengan rumah-rumah pejabat tinggi di kiri kanannya. Jalan tersebut biasanya dikenal sebagai *heerenstraat*, yang berarti "jalan para tuan besar" (Raap, 2015:56). Pembangunan jalan pada masa kolonial ditetapkan aturan sempadan bangunan berjarak lima kaki (sekitar 1,5m) dari sempadan jalan. Zona ini masih milik pemilik tanah, namun tidak boleh didirikan bangunan permanen agar jalan cukup lebar dan harmonis (Raap, 2015:56).

Penggunaan lahan selain untuk pertanian/perkebunan dan jaringan jalan kota Gorontalo pada masa kolonial, terbagi menjadi enam kawasan, yaitu; perkantoran, pasar dan perniagaan, permukiman, sekolah, rumah ibadah, hotel dan sarana hiburan (Lihat gambar 4). Kawasan perkantoran berpusat di



pusat kota (sekitar alun-alun), terdiri dari: kantor dan rumah dinas *Asisten Residen*, kontrolir (*controleur*), kantor pos dan telegram, KPM, kantor jaksa, penjara, dan rumah pastor. Kawasan pasar dan perniagaan berada di sebelah utara kawasan perkantoran, berupa pasar dan pertokoan. Kawasan pemukiman mengikuti pola pemukiman penduduk masa kolonial yang dikelompokkan berdasarkan etnis (Belanda, Cina, Arab, Bugis, Manado, Makassar, Gorontalo). Kawasan hiburan berada di sekitar alun-alun berupa gedung *societeit*, hotel dan gedung bioskop, yaitu *Societeit Wilhelmina*, *Hotel Velberg*, *Hotel Gorontalo*, dan *Societeit Juliana*. Kawasan pelabuhan berada di sekitar muara Sungai Bolango.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Sebuah kota akan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu menyangkut aspek politik, sosial, budaya, teknologi, ekonomi, dan fisik. Morfologi sebagai suatu pendekatan yang berkaitan langsung dengan ekspresi ruang kota, menyoroti eksistensi ruang perkotaan secara fisik, tidak hanya menjelaskan perubahan fisik kota saja (Zaidulfar, 2002:17). Pertumbuhan kota-kota di Asia Tenggara dipengaruhi majunya perdagangan dunia abad XVI. Kota semakin berkembang dengan semakin banyaknya pendatang asing (Eropa dan Cina) yang menetap di kota-kota tersebut (Reid, 1980:235-236). Kondisi tersebut juga terjadi di kota Gorontalo. Pada masa kota tradisional dan awal kerajaan Islam belum banyak pendatang yang datang dan menetap di Gorontalo, sehingga pola permukiman masih sederhana dan mengelompok dalam kelompok-kelompok. Setelah pendatang dari wilayah lain (Bugis,

Makassar, Ternate, Cina) membentuk permukiman tersendiri di luar kelompok-kelompok permukiman yang sudah ada sebelumnya. Permukiman pendatang menempati kawasan yang datar di dekat muara sungai dan teluk Tomini. Pemilihan lokasi permukiman tersebut berkaitan dengan kemudahan transportasi laut dan sungai yang menjadi sarana lalu lintas utama pada waktu itu (Hasanuddin, 2014:96). Gorontalo menarik perhatian VOC karena menjadi tempat yang strategis dalam rute perdagangan pantai timur Sulawesi dan hasil emasnya (Hasanuddin, 2014:34).

Permukiman penduduk sebagian sudah menetap di wilayah perkotaan yang baru. Faktor yang mempengaruhi penduduk menetap di wilayah perkotaan adalah adanya rasa aman karena dekat dengan penguasa lokal, dan adanya pemaksaan oleh VOC untuk tinggal di wilayah kota dan berdekatan dengan jalan untuk memudahkan pengawasan (Juwono dan Hutagalung, 2005:31; Apriyanto, 2001:47; Marzuki, 2012:34-35).

Perkembangan kota selanjutnya mengarah mendekati kawasan muara sungai dan Teluk Tomini. Faktor yang mempengaruhi arah perkembangan kota tersebut karena mendekati dengan kawasan pelabuhan untuk memudahkan transportasi keluar wilayah dan berada pada wilayah yang datar. Menurut Sujarto (1991), perkembangan dan pertumbuhan kota dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

- a. Manusia, menyangkut segi perkembangan tenaga kerja, status sosial, dan kemampuan teknologi.
- b. Kegiatan manusia, menyangkut segi kegiatan kerja, fungsional,

kegiatan perekonomian, dan hubungan regional yang lebih luas.

- c. Pola pergerakan antar kegiatan manusia sebagai akibat dari perkembangan penduduk dan fungsi kegiatannya.

Selain ketiga faktor tersebut di atas, perkembangan kota dipengaruhi unsur yang lebih mengacu kepada faktor internal atau situasi dan kondisi setempat, yaitu:

- a. Keadaan geografis, merupakan pertimbangan yang esensial pada awal penentuan lokasi sebuah kota. Keadaan geografis ikut mempengaruhi fungsi dan bentuk kota. Kota yang berada di lokasi yang datar dapat berkembang secara merata ke segala arah.
- b. Aspek tapak (*site*), mempengaruhi lokasi dan perubahan kota. Perubahan ruang kota sangat dipengaruhi oleh kemiringan lahan, keadaan geologis, dan fungsi yang diemban oleh kota itu.
- c. Sejarah dan kebudayaan, mempengaruhi karakter fisik dan sifat-sifat kemasyarakatan kota. Lokasi bersejarah dan bangunan-bangunan bersejarah menjadi pertimbangan untuk pengembangan kota (Branch, 1995:38-42).

Perkembangan morfologi suatu kota berkaitan erat dengan peningkatan status kota. Morfologi kota merupakan ilmu yang mempelajari bentuk dan fungsi kota. Morfologi memiliki kaitan erat dengan kualitas spasial dua dimensi dan unsur-unsur pembentuknya yang dapat dilihat melalui pola-pola yang tercipta. Morfologi lebih menekankan pada bentuk, sehingga untuk memberikan makna ataupun karakteristik suatu ruang perlu dilihat bagaimana nilai ruang tersebut (Pratomo, 2001:109). Menurut Herbert seperti dikutip oleh Yunus

(2009), tinjauan terhadap morfologi kota ditekankan pada bentuk-bentuk fisik lingkungan kota, dan dapat diamati secara fisik, seperti jaringan jalan, blok-blok bangunan pemukiman atau perdagangan. Morfologi merupakan formasi sebuah objek bentuk kota dalam skala luas. Morfologi perkotaan adalah penataan atau formasi keadaan kota sebagai objek dan sistem yang dapat diselidiki secara struktural, fungsional, dan visual (Zahnd, 1999). Morfologi kota memiliki tiga unsur, yaitu: penggunaan lahan, pola jalan, dan tipe bangunan. Morfologi setiap kota berbeda-beda, sehingga morfologi kota menjadi pembentuk karakteristik atau ciri khas suatu kota (Tallo, dkk, 2014:215).

Penggunaan lahan pada masa kerajaan tradisional masih sederhana, hanya untuk permukiman, perkebunan dan persawahan. Pola permukiman masih sederhana, mengelompok dan berada pada wilayah pedalaman yang jauh dari pantai. Pola jalan masih sederhana dan belum memiliki pola yang teratur. Pola jalan tersebut dapat dikategorikan sebagai jalur informal atau jalur tidak resmi, biasanya berupa jalan setapak atau jalur perdagangan dengan konstruksi yang tidak bagus (Earle (1991:10; Trombold 1991:3).

Pola tata ruang kota sederhana, yang menggambarkan pola hidup masyarakat pada masa tersebut masih belum begitu kompleks. Teknologi masih sederhana, hal ini dapat dilihat dari bentuk rumah dan teknologi pembangunan rumah. Kondisi jalan yang masih berupa jalur informal, berupa jalan tanah, dikarenakan sarana transportasi yang digunakan masih sederhana (kuda, sapi atau gerobak).

Perkembangan pada masa kerajaan Islam, pusat kota sudah ditata dan pola jalan dibuat persegi (*grid*). Penggunaan lahan tidak hanya untuk permukiman dan perkebunan atau sawah, namun sudah ada penggunaan untuk pemakaman, pertahanan, dan rumah ibadah. Penggunaan pola jalan *grid* bertujuan untuk efisiensi penggunaan ruang (anggapan bahwa bangunan pada umumnya berbentuk persegi) dan berkaitan dengan penyiapan jalan untuk keperluan barisan prosesi memanjang dan lurus (*straight processional street*). Penggunaan lahan pada masa kolonial bertambah dengan adanya penambahan kawasan perdagangan, sekolah, lapangan terbuka, hotel dan hiburan. Perubahan penggunaan lahan sesuai dengan perkembangan kota dan bertambahnya pendatang yang menetap di kota Gorontalo.

Berdasarkan perkembangan morfologi kota dari tradisional hingga kolonial, dapat diketahui pola pikir dan tingkah laku manusia masa lalunya. Pada masa kota tradisional, kehidupan masih sederhana, mengelompok, bersifat agraris, tinggal dalam rumah-rumah panggung yang sederhana. Hubungan antara individu yang terjalin masih belum kompleks, karena sebagian besar masih memiliki hubungan kerabat satu sama lain. Kemampuan teknologi masih sederhana, dan jaringan jalan masih belum teratur. Perkembangan terjadi setelah terjadinya kontak dengan pendatang dari suku dan bangsa lain, seperti: Bugis, Makassar, Buol, Ternate, Sangir, Toli-Toli, Parigi, Cina, Minahasa, dan Belanda. Mata pencaharian masyarakat sebagian berubah menjadi pedagang perantara antara penduduk lokal dengan pendatang.

Hubungan social sudah terdapat kelas-kelas social berupa raja dan pejabat-pejabat kerajaan. Kemampuan teknologi sudah mengalami peningkatan, terlihat dari kemampuan menata kota dengan segala komponennya. Masyarakat yang memiliki kelas sosial tinggi tinggal di sekitar istana dan dalam kota, sedangkan masyarakat biasa tinggal di pinggiran atau luar kota. Pada masa kolonial, hubungan sosial semakin kompleks dengan hadirnya penguasa Belanda. Penguasa Belanda membangun kota baru di sebelah selatan kota lama. Bangunan perkantoran dan perumahan sebagian besar sudah menggunakan bata (*rumah batu* dalam istilah Gorontalo) atau perpaduan kayu dan batu. Jaringan jalan sudah lebar, bagus dan teratur sehingga mudah untuk dilewati kendaraan.

KESIMPULAN

Pusat kota Gorontalo merupakan pusat kekuasaan kerajaan Gorontalo mulai dari masa tradisional, kerajaan Islam, hingga kolonial. Berdasarkan analisis keletakan pusat kota Gorontalo mulai kota tradisional, kerajaan, hingga kolonial, dapat diketahui lokasi pusat kota bergerak dari pedalaman menuju arah pantai. Pemilihan lokasi kota tradisional di pedalaman (jauh) dari laut dan berdekatan dengan sungai berdasarkan faktor keamanan, karena pada masa tersebut wilayah pantai Laut Sulawesi tidak aman. Pemilihan lokasi dekat dengan sungai bertujuan untuk memudahkan transportasi dengan wilayah luar Gorontalo, karena sungai merupakan sarana transportasi pada waktu itu. Perkembangan selanjutnya pusat

kota mengarah ke arah pantai karena kondisi keamanan yang semakin baik. Selain faktor keamanan, pemilihan lokasi pusat kota Gorontalo mencari tempat yang datar.

Perubahan morfologi terjadi pada masa Sultan Botutihe yang meletakkan dasar pembangunan kota Gorontalo. Morfologi kota pada periode ini berbentuk persegi atau kotak, dengan jaringan jalan berpola kotak-kotak (*grid*) yang membatasi kawasan permukiman. Perkembangan kota pada masa pemerintahan kolonial Belanda membuat morfologi kota Gorontalo berubah dari bentuk persegi atau kotak menjadi bentuk kipas. Perubahan morfologi tersebut disebabkan karena kondisi geografis wilayah Gorontalo yang terletak dalam sebuah teluk dan diapit dua perbukitan. Pola kota mengacu

kepada pola kota kolonial baru (*nieuw indisch stad*) yang hanya terdapat satu pusat pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan morfologi kota Gorontalo meliputi; kebijakan penguasa, kondisi geografis, dan bertambahnya jumlah penduduk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari disertasi mengenai perkembangan struktur tata ruang kota Minahasa masa kolonial, tahun 1789-1945. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Anggraeni, M.A dan Dr. Sri Margana, M.Phil atas masukan-masukannya, dan Romi Hidayat atas bantuan serta izin penggunaan dokumentasi dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrisijanti, Inajati. 2000. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Yogyakarta : Penerbit Jendela.
- ANRI, 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848*, Jakarta : Arsip nasional Republik Indonesia.
- Apriyanto, Djoni. 2001. "Konflik Hindia Belanda-Gorontalo Tahun 1856-1942", *Tesis*. Yogyakarta : Program Pascasarjana.
- Bastiaans, J. 1939. "Batato's in het Oude Gorontalo, in verband met den Gorontaleeschen Staatsbouw". *Tijdschrift Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* 179 : 23-72.
- Basundoro, Purnawan. 2012. *Pengantar Sejarah Kota*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Branch, Melville. C. 1995. *Perencanaan Kota Komprehensif (Pengantar dan Penjelasan)*, diterjemahkan oleh Bambang Hari Wibisono dan Achmad Djunaedi, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Earle, Timothy. 1991. "Paths and Roads in Evolutionary Perspective", dalam *Ancient Road Networks and Settlement Hierarchies in the New World*, Cambridge : Cambridge University Press.
- Gill, R. G. 1995. *De Indische Stad op Java en Madura, een Morphologische Studie van haar Ontwikkeling*, Delft : Technische Universiteit Delft.
- Haga, BJ. 1981. *Lima Pohalaa : Susunan Masyarakat, Hukum Adat, dan Kebijakan Pemerintahan di Gorontalo* (terjemahan KITLV-LIPI) Jakarta : Djambatan.
- Handinoto. 2010a. "Alun-alun Sebagai Identitas Kota Jawa, Dulu dan Sekarang", dalam *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada Masa Kolonial*, Yogyakarta : Grha Ilmu.
- Handinoto. 2010b. "Perubahan Besar Morfologi Kota-Kota di Jawa pada Awal dan Akhir Abad ke-20", dalam *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada Masa Kolonial*, Yogyakarta : Grha Ilmu.
- Handinoto. 2015. *Perkembangan Kota di Jawa Abad XVIII sampai pertengahan XX Dipandang dari Sudut Bentuk dan Struktur Kotanya*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Hasanuddin dan Basri Amin. 2010. *Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Hasanuddin. 2014. *Pelayaran dan Perdagangan Gorontalo Abad Ke-18 dan 19*, Yogyakarta : Kepel Press.

- Henley, David. 2005. *Fertility Food and Fever Population, Economy, and Environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930*, Leiden : KITLV Press.
- Heryanto, B. 2011. *Roh dan Citra Kota Peran Perancangan Kota Sebagai Kebijakan Publik*. Surabaya : Brilian Internasional.
- Ismail, Gusnar. 2009. *Kepemimpinan Islam dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Propinsi Gorontalo)*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Jusuf. Paris R.A. 2000. *Pembentukan Propinsi Gorontalo dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Wilayah*, Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UGM.
- Juwono, Harto dan Josephine Hutagalung. 2005. *Limo Lo Pohala Sejarah Kerajaan Gorontalo*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- King, Anthony D. 1991. "Colonial Cities: Global Pivots of Change", dalam *Colonial Cities Essay on Urbanism in a Colonial Context (Robert Ross and Gerard J. Telkamp ed)*, Dordrecht : Martinus Nijhoff Publisher.
- Kurniawan, Jujun. 2011. "Tinjauan Umum Mengenai Penelitian Kota Kolonial pada Arkeologi Perkotaan di Indonesia", makalah dalam *International Seminar Urban Heritage Its Contribution to the Present A Festschrift in Honor of Prof. Dr. Inajati Adrisijanti*, Yogyakarta : Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, UGM.
- Marzuki, Irfanuddin W. 2012. Pola Sebaran Bangunan Indis di Kota Gorontalo dan Strategi Pelestariannya. *Tesis*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Menno, S dan Mustamin Alwi. 1994. *Antropologi Perkotaan (cet. Kedua)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nas, Peter J. M. 1986. *The Indonesia City : Studies in Urban Development and Planning*, Dordrecht-Holland : Foris Publications.
- Nas, Peter J.M. 1989. "Town and Countryside in Indonesia : A Sceptic's View". *Sojourn : Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 4, No. 1, *Peasant and Cities, Cities and Peasants : Rethinking Southeast Asian Models (February 1989)*, pp. 20-33. Diunduh dari www.jstor.org, tanggal 16 Februari 2015.
- Nurhadi. 1995. "Arkeologi Kota Sebuah Pengantar". *Bulletin Arkeologi Amoghapasa*, 2 (1) : 3-10.
- Paulus, J. 1917. *Encyclopaedie Van Nederlandsch Indie, Tweede Druk met Medewerking Van Verschillende Geleerden Ambtenaren en Officieren*, Martinus Nijhoff.

- Pratomo, Soni, 1999. *Makna Struktur dan Unsur Pembentuk Pusat Kota Pelabuhan Tuban Kajian Morfologi dan Silang Budaya Pusat Kota Pesisir*, Semarang : Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Raap, Oliver Johannes. 2015. *Kota di Djawa Tempo Doeloe*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rahim, Idris. 2009. *Identitas Etno Religi dalam Pembentukan Propinsi Gorontalo*, Yogyakarta : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Reid, Anthony . 1980. "The Structure of Cities in Southeast Asia, Fifteenth to Seventeenth Centuries". *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 11, No.2 (Sep, 1980), pp. 235-250. Diunduh dari www.jstor.org tanggal 24 Februari 2015.
- Santoso, Jo. 2006. *(Menyiasati) Kota Tanpa Warga*. Jakarta : Penerbit KPG dan Centropolis.
- Saptaningrum, Irna. 2008. "Kajian Tata Ruang Kota Gorontalo," *Laporan Penelitian*, Manado : Balai Arkeologi Manado (tidak diterbitkan).
- Staski, Edward. 1982. "Advances in Urban Archaeology". *Advances in Archaeological Method and Theory*, Vol. 5 (1982), pp. 97-149. Diunduh dari <http://www.jstor.org/stable/20210054>, tanggal 18 Oktober 2017.
- Staski, Edward. 2008. "Living in Cities Today". *Historical Archaeology*, Vol. 42, No. 1, *Living in Cities Revisited: Trends in Nineteenth- and Twentieth-Century Urban Archaeology (2008)*, pp. 5-10. Diunduh dari <http://www.jstor.org/stable/25617479>, tanggal 18 Oktober 2017.
- Sujarto, Djoko. 1991. *Perencanaan Kota dan Kebijakan Perencanaan Kota di Indonesia*, Bandung : Departemen Teknik Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB.
- Sunaryo, R. G. 2015. *Morfologi Ruang Pusat Kota Jawa Periode Kolonial*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Tallo, Armandus Jong, dkk. 2014. "Identitas Pola Morfologi Kota (Studi Kasus : Sebagian Kecamatan Klojen Di Kota Malang)". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 25, No. 3 (Desember 2014): 213-227.
- Tanudirdjo, Daud Aris. 1989. "Ragam Metode Penelitian Arkeologi dalam Skripsi Karya Mahasiswa Arkeologi Universitas Gadjah Mada", *Laporan Penelitian*, Yogyakarta : Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Taylor, Jean G. 2003. *Indonesia Peoples and Histories*, New Heaven and London : Yale University Press.

- Tim Penyusun. 1977/1978. *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara*, Jakarta : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Penyusun. 1979. *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*. Jakarta : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Penyusun. 2008. *Metode Penelitian Arkeologi*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.
- Tjandrasasmita, Uka. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia III (Edisi Pemutakhiran cetakan kedua)*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Trombold, Charles, D. 1991. " An Introduction to the Study of Ancient New World Road Networks", dalam *Ancient Road Networks and Settlement Hierarchies in the New World*, Cambridge : Cambridge University Press.
- Wertheim, W.F. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi Studi Perubahan Sosial (terjemahan oleh Misbah Zulfa Elizabeth)*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Wiryomartono, A. Bagoes P. 1995. *Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yayasan 23 Januari 1942. 1982. *Menentang Kolonialisme dan Mempertahankan Negara Proklamasi*, Gorontalo : Yayasan 23 Januari 1942 bekerja sama dengan IKIP Manado Cabang Gorontalo.
- Yunus, Hadi Sabari. 2009. *Klasifikasi Kota Cet. II*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zahnd, Markus. 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta : Kanisius.
- Zaidulfar, Alvares Eko. 2002. *Morfologi Kota Padang*, Yogyakarta : Fakultas Teknis Arsitektur UGM.
- <http://gorontalokota.go.id>, diunduh tanggal 26 September 2017.
- <https://www.gorontaloprov.go.id/profil/sejarah>, diunduh tanggal 26 September 2017
- www.atlasofmutualheritage.nl/nl/Het-fort-Nassau-Gorontalo.7608, diunduh tanggal 20 Desember 2017.